



## **URGENSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DI BANTEN DALAM PERSPEKTIF KEKINIAN**

*Oleh : Admin Pengelola JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Banten*

---

### **Abstrak**

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan pilar penting dalam pembangunan nasional, terutama di Provinsi Banten yang mayoritas wilayahnya masih bercorak perdesaan. Artikel ini membahas urgensi pemberdayaan masyarakat desa dengan meninjau kondisi terkini, tantangan baru, serta regulasi terbaru yang mendukung. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2025 menunjukkan jumlah penduduk miskin di Banten sebanyak 772.780 jiwa atau 5,63%, dengan tren penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, tingkat pengangguran terbuka masih tinggi, mencapai 412.710 orang, menempatkan Banten pada posisi keempat nasional. Selain itu, kasus keterlambatan penyaluran BLT Dana Desa, keterbelakangan infrastruktur, serta problem ketahanan pangan masih menjadi isu nyata di perdesaan. Dengan kerangka regulasi baru seperti Perpres No. 104/2021 dan Permendesa PDTT No. 7/2023, pemberdayaan masyarakat desa di Banten diharapkan mampu mendorong kemandirian, memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, dan mewujudkan desa mandiri yang berdaya saing.

*Kata Kunci:      Pemberdayaan,      Masyarakat      Desa,      Banten,      Regulasi,      Kemandirian*

## **A. Pendahuluan**

Pemberdayaan masyarakat desa di Indonesia selalu menjadi topik strategis, khususnya di Provinsi Banten. Permasalahan klasik seperti kemiskinan, pengangguran, akses layanan publik, serta kelembagaan desa yang belum optimal masih menjadi tantangan. Namun, masyarakat desa memiliki modal sosial yang kuat berupa gotong royong, solidaritas, dan kearifan lokal.

Sejak diberlakukannya Otonomi Daerah pada tahun 2000, desa memperoleh kewenangan yang lebih luas untuk mengelola urusan rumah tangganya. Sejalan dengan itu, kebijakan desentralisasi fiskal melalui Dana Desa telah menjadi instrumen penting dalam pembangunan desa. Keberhasilan pemberdayaan desa di Banten akan sangat menentukan arah pembangunan provinsi ini, mengingat lebih dari separuh penduduknya tinggal di wilayah perdesaan.

Membangun desa yang maju dan mandiri merupakan salah satu agenda pembangunan nasional. Terlebih di Provinsi Banten, dengan karakteristik wilayah yang beragam, mulai dari daerah urban hingga pedesaan, urgensi pemberdayaan masyarakat desa menjadi semakin krusial. Dalam perspektif kekinian, pemberdayaan masyarakat desa di Banten tidak lagi hanya dilihat sebagai program sosial, melainkan sebagai fondasi utama untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

## **B. Pembahasan**

### **1. Tantangan dan Peluang Kekinian**

Di era digital dan globalisasi saat ini, desa di Banten dihadapkan pada berbagai tantangan. Arus informasi yang deras, migrasi penduduk ke kota, dan perubahan iklim adalah beberapa contoh tantangan yang memerlukan respons adaptif. Di sisi lain, kemajuan teknologi informasi

membuka peluang besar bagi desa untuk mengembangkan potensi ekonomi dan sosial.

Pemanfaatan teknologi digital menjadi kunci dalam pemberdayaan masyarakat desa. Melalui platform digital, produk-produk unggulan desa dapat dipasarkan secara lebih luas, akses ke informasi pertanian dan perikanan modern menjadi lebih mudah, dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa dapat ditingkatkan. Selain itu, pengembangan ekowisata dan agrowisata berbasis komunitas menjadi peluang untuk mengoptimalkan potensi alam dan budaya lokal, sekaligus membuka lapangan pekerjaan baru.

## 2. Kondisi Terkini Masyarakat Desa di Banten.

Menurut data BPS Maret 2025, angka kemiskinan di Banten mencapai 772.780 jiwa atau 5,63%, turun 0,21 persen poin dari Maret 2024. Di perdesaan, kemiskinan juga menurun dari 6,20% menjadi 5,89%. Meskipun menurun, garis kemiskinan di Banten masih tinggi, yakni Rp 684.232 per kapita per bulan, dengan beban terbesar berasal dari kebutuhan pangan pokok seperti beras, rokok kretek, dan telur ayam ras.

Di sisi lain, pengangguran masih menjadi masalah serius. BPS Februari 2025 mencatat jumlah pengangguran terbuka sebanyak 412.710 orang, menempatkan Banten pada posisi keempat dengan angka pengangguran tertinggi di Indonesia. Kesenjangan desa-kota masih terasa, terutama pada akses pendidikan, kesehatan, digitalisasi, dan infrastruktur.

## 3. Kasus dan Permasalahan Aktual.

Selain angka statistik, terdapat permasalahan lapangan yang perlu mendapat perhatian. Kasus keterlambatan penyaluran BLT Dana Desa di Desa Cigayam menjadi contoh nyata lemahnya transparansi dan tata kelola keuangan desa. Ratusan warga bahkan melakukan aksi protes karena bantuan untuk 60 KPM tahun 2024 tidak kunjung direalisasikan.

Di sisi lain, kritik publik menyebutkan bahwa beberapa wilayah Banten seperti Cibubur, Anyer, dan Cilegon masih terasa stuck di era 90-an', akibat keterbatasan infrastruktur dan lambannya transformasi ekonomi. Problem ketahanan pangan juga menjadi sorotan, di mana desa-desa menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok akibat keterbatasan teknologi, mahalnya pupuk, dan dominasi komoditas non-pangan seperti sawit.

#### 4. Kerangka Regulasi dan Kebijakan Terbaru

Pemberdayaan masyarakat desa kini diperkuat oleh sejumlah regulasi, di antaranya :

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN, yang mengatur alokasi Dana Desa minimal 40% untuk BLT, 20% untuk ketahanan pangan, dan sebagian untuk kesehatan.
- Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024, yang memfokuskan pada penghapusan kemiskinan ekstrem, pencegahan stunting, peningkatan ekonomi produktif, digitalisasi desa, serta adaptasi perubahan iklim.
- RPJMN 2025–2029, yang menekankan green economy, transformasi digital, dan penguatan ekonomi desa sebagai motor pembangunan nasional.

#### 5. Strategi Pemberdayaan Desa di Banten

- Untuk mewujudkan desa mandiri dan berdaya saing, strategi pemberdayaan masyarakat desa di Banten perlu diarahkan pada: Penguatan ekonomi lokal melalui pertanian organik, pariwisata desa, UMKM digital, dan ekonomi kreatif.
- Transparansi pengelolaan Dana Desa dan peningkatan akuntabilitas aparatur desa.

- Percepatan pembangunan infrastruktur dasar untuk mengurangi kesenjangan desa-kota.
- Transformasi digital desa, termasuk literasi digital dan layanan publik berbasis teknologi.
- Peningkatan kapasitas SDM, terutama generasi muda desa melalui pendidikan vokasi.
- Program ketahanan pangan dengan dukungan teknologi dan distribusi pupuk yang adil.
- Mitigasi perubahan iklim melalui reboisasi, konservasi, dan energi terbarukan skala desa.

#### 6. Pemetaan Teori ke Aksi Konkret di Banten

| Teori                     | Rekomendasi Aksi Konkret di Banten                                                                |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capability Approach       | Beasiswa kursus digital & sertifikasi, klinik gizi desa, akses internet bermakna di balai desa.   |
| Empowerment (Kabeer)      | Kuota 30% suara perempuan/pemuda/disabilitas di Musdes; skema modal mikro BUMDes untuk perempuan. |
| ABCD                      | Asset mapping dan katalog aset desa; festival produk desa Anyer–Pandeglang; marketplace BUMDes.   |
|                           |                                                                                                   |
| Co-production (Ostrom)    | Dashboard transparansi BLT & Dana Desa; audit sosial triwulanan bersama BPD dan komunitas.        |
| Participatory Development | Peta kemiskinan partisipatif; CLD pangan untuk Lebak–Pandeglang.                                  |
| Social Capital            | Program magang industri Cilegon–Serang; koperasi rantai pasok lokal.                              |

|                    |                                                                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Collective Impact  | Sekretariat backbone provinsi untuk stunting & kemiskinan ekstrem; indikator bersama lintas OPD. |
| Digital Inclusion  | Pelatihan literasi digital; layanan adminduk online; dukungan UMKM daring.                       |
| Resilience         | Diversifikasi komoditas; early warning cuaca; asuransi tani/nelayan; perlindungan pesisir.       |
| Doughnut Economics | RPJMDes dengan indikator sosial minimum & batas ekologi; pengelolaan sampah & air.               |
| Mission-Oriented   | Misi 'Nol Stunting & 1.000 Wirausaha Muda' 2025–2027; pembiayaan campuran.                       |
| Theory of Change   | Kerangka ToC per program; monitoring outcome kapabilitas, bukan hanya output fisik.              |

### C. Penutup

Pemberdayaan masyarakat desa di Banten pada tahun 2025 menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari pengangguran, kemiskinan, keterlambatan penyaluran BLT, hingga lemahnya ketahanan pangan. Namun, adanya dukungan regulasi terbaru dan partisipasi masyarakat membuka peluang besar bagi desa untuk bertransformasi. Dengan transparansi, inovasi, dan partisipasi aktif, desa-desa di Banten berpotensi tumbuh menjadi desa mandiri, maju, dan berdaya saing, yang pada gilirannya menentukan keberhasilan pembangunan Provinsi Banten secara keseluruhan.

Pemerintah Provinsi Banten perlu bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota, akademisi, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil untuk merumuskan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan desa. Beberapa langkah strategis yang dapat ditempuh antara lain:

- (1) Peningkatan Akses dan Literasi Digital: Memastikan setiap desa memiliki akses internet yang stabil dan masyarakatnya memiliki kemampuan untuk memanfaatkannya.
- (2) Penguatan Kapasitas Kelembagaan: Memberikan pelatihan teknis dan manajerial kepada perangkat desa dan pengurus BUMDes.
- (3) Pemberdayaan Berbasis Potensi Lokal: Mengidentifikasi dan mengembangkan potensi unik setiap desa, baik itu di sektor agraris, bahari, maupun budaya.
- (4) Fasilitasi Kemitraan: Membuka jalur kemitraan antara desa dengan sektor swasta untuk membuka akses pasar dan permodalan.

Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat desa di Banten dalam perspektif kekinian bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Ini adalah investasi jangka panjang untuk menciptakan desa yang berdaulat, berdaya saing, dan berkelanjutan, yang pada akhirnya akan memperkuat fondasi pembangunan nasional secara keseluruhan.